

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peran

##### 1. Pengertian Peran

Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”. (Bruce J Cohen, 1992, 76).

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009, 106) Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Istilah “peran” (role) dipilih secara baik karena bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional (Maurice Duverger, 2010, 103). Maurice Duverger juga menjelaskan bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”.

Sedangkan menurut terminology, peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir 2018, 86).

Menurut Soekanto, Peranan merupakan aspek dinamis apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya” (Soerjono Soekanto, 2009).

## **2. Teori Peran**

Leslie L. Hemphil menyatakan Teori peran, kemudian, menguji proposisi dalam kaitannya dengan munculnya peran, perolehan peran, dan ekspektasi yang mempertahankan perilaku peran dalam konteks tertentu. Artinya bahwa peran itu harus dilihat dari beberapa segi, yakni yang melatarbelakangi munculnya peran pada diri seseorang dan atau lembaga; cara memperoleh peran itu seperti apa; dan dalam konteks tertentu bahwa seseorang dan atau lembaga harus melihat harapan masyarakat terhadap dirinya agar peran yang melekat pada diri seseorang dan atau pada Lembaga itu dapat dilaksanakan semestinya dengan baik (Suharto, 2017:77).

Glen H. Elder seorang sosiologi, menggunakan teori peran dengan pendekatan *life course*. Artinya, setiap masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Sarwono, 2002:20).

Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering digunakan menggambarkan teori peran (Soekanto, 2017:200).

Menurut Robert Linton, teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut (Soekanto, 2017:202).

Robert Mac Iver dan Charles H. Page Mengartikan lembaga sosial sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar-manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan *association* (Wulansari, 2013:90).

Alvin L. Bertrand menyatakan bahwa: Institusi-institusi sosial pada hakikatnya adalah kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur sosial)

yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi ini meliputi kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri-sendiri (Wulansari, 2013:92).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori peran yang disampaikan oleh leslie L. Hemphil. Teori peran ini didasarkan pada latar belakang munculnya peran, perolehan peran, dan ekspektasi yang mempertahankan perilaku peran dalam konteks tertentu.

### **3. Aspek-Aspek Peran**

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut (Suhardono, 1994:46):

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan

dimasyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang.

Peran menurut Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa memiliki empat dimensi yaitu, peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Adapun penjelasan dari dimensi tersebut sebagai berikut (Horoepoetri, Arimbi, & Santosa, 2003:35):

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

## B. Pemberdayaan

Pemberdayaan secara konseptual juga bisa disebut pemberkuasaan yang berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu "*power*" (kekuasaan atau keberdayaan). Maka dari itu ide konseptual pemberdayaan berhubungan dengan konsep tentang kekuasaan. Dalam ilmu sosial tradisional menjelaskan mengenai kekuasaan yang berkaitan terhadap pengaruh dan kontrol yang menggambarkan bahwa kekuasaan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dirubah oleh manusia. Namun kekuasaan seharusnya tidak terbatas pada pengertian secara tradisional, kekuasaan sendiri sebenarnya selalu hadir dalam relasi sosial manusia dan tercipta di dalam relasi sosial. Dengan pemikiran mengenai kekuasaan seperti ini, menjadikan pemberdayaan sebagai proses perubahan dengan konsep yang sangat bermakna. (edi Suharto 2021, 58).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Eddy Ch. Papilaya, 2001). (Zubaedi, 2013:24).

Adapun pengertian pemberdayaan menurut beberapa pendapat ahli sebagai berikut :

1. Menurut Rappaport (1984) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.
2. Menurut Parson (1994) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai

pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

3. Menurut Ife (1995) pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan manunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun seosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indicator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Edi Suharto, 2014 : 59-60).

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu “*syaraka*” artinya ikut serta, berpartisipasi, atau “*musyaraka*” yang artinya saling bergaul. Dalam bahasa Inggris memakai istilah “*society*”. Kata tersebut beraasal dari bahasa latin “*socius*”, artinya

kawan (Koentjaraningrat, 2000 : 143). Pendapat lainnya menyebutkan istilah masyarakat yaitu dengan kata *society* dan *community*.

Masyarakat dalam istilah *society* diartikan sebagai suatu badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang bersama dianggap sebagai suatu golongan yang terbagi dalam berbagai kelas menurut kedudukan dalam masyarakat itu (Hasan Shadely, 1993 : 59-60). Pengertian lain dari *society* adalah hubungan social, tingkah laku dan cara hidup manusia di dalam masyarakat dari kalangan tinggi, kaum elite, dan lain-lain yang menduduki kelas tinggi dalam masyarakat (Adon Nasrullah, 2015 : 6).

Istilah *community* diartikan sebagai masyarakat setempat, seperti warga desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama, kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama, kelompok tersebut disebut sebagai masyarakat setempat. Dengan demikian kriteria utama bagi adanya suatu masyarakat setempat adalah adanya *relationships* antara anggota dan kelompok (Soejono Soekanto, 1990 : 162).

*Community* mempunyai dua arti (Talizi, 1990 : 49), yaitu : Pertama, sebagai kelompok social yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama. Kedua, sebagai suatu pemukiman yang terkecil , di atasnya ada kota kecil (*town*), dan di atas kota kecil ada kota besar (*city*). (Roesmidi dan Riza Risyanti, 2006 : 7)



Istilah lain *community* lebih mengarah pada pengertian masyarakat dalam arti paguyuban. Jika *society* berarti masyarakat umum, *community* menunjukkan arti masyarakat yang terbatas, misalnya masyarakat Jakarta, masyarakat Bandung dan masyarakat lainnya. (Adon Nasrullah, 2015 : 7)

Melihat kenyataan di lapangan suatu kelompok masyarakat dapat berupa suatu suku bangsa, atau juga berlatar belakang dari berbagai macam suku. Dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat, dapat digolongkan menjadi masyarakat primitif (suku terasing), masyarakat sederhana (masyarakat pedesaan) dan masyarakat maju (masyarakat modern).

Pertama, masyarakat primitif adalah kelompok masyarakat yang masih asli peradaban atau kebudayaannya, artinya kebudayaan yang dimiliki tidak bercampur atau pengaruh dari dunia luar. Masyarakat primitif pada umumnya terdapat di daerah pedalaman (pegunungan atau pedesaan).

Kedua, masyarakat sederhana adalah masyarakat *community* (masyarakat setempat), artinya suatu kelompok teritorial yang menyelenggarakan kegiatan hidup di suatu wilayah sesuai dengan tingkat peradabannya (Adon Nasrullah, 2015 : 25).

Ketiga, masyarakat maju (masyarakat kota) anggotanya terpisahpisah, saling tidak kenal, dan lebih terikat kontek kekeluargaan, hubungannya serta lugas, lepas dari pribadi dan sentiment serta ikatan tradisi dengan tanpa kepemimpinan mapan. (Adon Nasrullah, 2015 : 26)

Selain itu ada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan (*rural community, dan urban community*), dua istilah tersebut sering dibedakan karena masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, sebagai tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat gula dan bahkan tukang catut, akan tetapi inti dari pekerjaan masyarakat adalah pertanian. Sedangkan masyarakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Pengertian “kota” terletak pada sifat serta ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. (Soejono Soekanto, 1990 : 166-169)

### **1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan ditunjukkan untuk meningkatkan kekuasaan (power) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). Menurut Ife (1995) pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010: 58).

Pemberdayaan diupayakan menuju kemandirian klien yaitu suasana atau kondisi tertentu yang membuat individu atau kelompok manusia yang telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok (Chatarina Rusmiyati, 2011: 16).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, pikomotorik dan afektif dengan pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 80).

Sunit Agus Tri Cahyono (2008:10) mengemukakan bahwa tujuan akhir dari suatu pemberdayaan adalah meningkatkan derajat kemandirian sasaran dalam masyarakat yaitu (individu, keluarga, kelompok dan suatu komunitas masyarakat). Sedangkan menurut Sri Kuntari (2009: 13) mengemukakan bahwa tujuan akhir dari

suatu pemberdayaan masyarakat yaitu harus membuat masyarakat menjadi swadiri, mampu mengurus dirinya sendiri, swadana, mampu membiayai keperluan sendiri, dan swasembada yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.

## **2. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut ialah meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transpormasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 83).

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya atau pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi saat berlangsungnya suatu pemberdayaan masyarakat.

Tahap kedua atau tahap transformasi kemampuan yaitu suatu proses mentransformasi pengetahuan dan kecakapan-keterampilan. Proses tersebut dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah berjalan dan kondusif. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat berperan pasif, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek dari suatu pembangunan saja, belum berperan aktif sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan tahap ketiga atau tahap peningkatan intelektual dan kecakapan-keterampilan merupakan tahap yang diperlukan agar masyarakat dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pemberdayaan atau pembangunan.

Wilson (Totok Mardikanto, 2013: 122-123) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus yang terdiri dari:

- a. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan
- b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau kenikmatan dan hambatan-hambatan yang dirasakan.

- c. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- d. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat atau perbaikannya.
- e. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
- f. Peningkatan efektifitas dan efesiensi kegiatan pemberdayaan.
- g. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tahapan tahapan pemberdayaa pada intinya ada tiga tahap, yaitu:

a. Penyadaran masyarakat

Penyadaran masyarakat dilaksanakan dengan sosialisasi. Tujuannya yaitu mengkomunikasikan program kegiatan yang akan diselenggarakan atau dilaksanakan serta menumbuhkan keinginan dan kemauan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut.

b. Proses pemberdayaan masyarakat

Proses ini dilaksanakan dengan transformasi pengeahuan dan keterampilan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan pasrtisipasi, baru hanya sekedar menjadi objek.

c. Pemandirian masyarakat

Pemandirian masyarakat dilakukan dengan pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

C. Kesejahteraan sosial

**1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Sosial**

Kesejahteraan sosial dalam Undang-undang No 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Rukminto kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu menerapkan suatu kajian yang mengembangkan suatu kerangka pemikiran dan metodologi, dimana metodologi tersebut bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas hidup terhadap masyarakat yang melalui suatu pengelolaan dalam suatu masalah sosial, dimana hal tersebut merupakan sebagai pemenuhan hidup untuk masyarakat serta dapat memaksimalkan suatu kesempatan pada sekelompok masyarakat maupun anggota masyarakat agar dapat berkembang (Adi, 2015:5).

Menurut Suparlan, kesejahteraan sosial menunjukkan keadaan sejahtera secara keseluruhan, baik fisik, mental, maupun sosial, bukan hanya kondisi dan kegiatan untuk memperbaiki dan menghilangkan penyakit sosial tertentu (Suparlan, 2004:10).

Kesejahteraan juga dapat didefinisikan sebagai gambaran tentang keadaan manusia yang serba kecukupan, terpenuhi kebutuhan baik sandang, pangan, rumah,

kesehatan, pendidikan, rekreasi dan yang lainnya. masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhannya lebih dari yang dibutuhkan atau tidak hanya sekedar untuk bertahan hidup tetapi juga untuk mempermudah, menyenangkan dan dan meningkatkan secara berkesinambungan. Dengan demikian setiap orang mampu hidup dengan layak sebagai manusia dan mampu mengembangkan bakat yang ada pada dirinya dengan maksimal (Ala, 1996:42).

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mengambil kesimpulan terkait kesejahteraan sosial adalah suatu kajian ilmu yang menerangkan terkait kondisi sosial masyarakat. Kemudian kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi dimulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sosial masyarakat sehingga mereka bisa bertahan hidup di lingkungan masyarakatnya.

## **2. Aspek Kesejahteraan Sosial**

Selain mempunyai tujuan dan fungsi, Kesejahteraan sosial memiliki aspek yang harus diperhatikan aspek tersebut nantinya dapat menjadikan perbedaan kegiatan kesejahteraan sosial dengan kegiatan lainnya Fahrudin menyimpulkan bahwa semua aspek tersebut adalah (Fahrudin, 2012:40-41)

- a. Organisasi formal, usaha kesejahteraan sosial yang terorganisir yang dilaksanakan oleh lembaga sosial formal untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat karena memberikan pelayanan karena memberikan pelayanan yang merupakan fungsi utama dari lembaga kesejahteraan sosial;



- b. Pendanaan, mobilisasi dana merupakan tanggung jawab bersama karena kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan.;
- c. Kebutuhan manusia, kesejahteraan sosial memandang seluruh kebutuhan manusia, tidak hanya fokus satu aspek untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Agar dapat memenuhi seluruh aspek tersebut lembaga formal menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. Profesionalisme, pelayanan kesejahteraan sosial tentunya dilaksanakan dengan proses dan peraturan yang telah di tentukan;
- e. Perangkat hukum dan perundang-undangan, pentingnya peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial secara terstruktur dan tepat sasaran;
- f. Peran serta masyarakat, kegiatan kesejahteraan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat itu sendiri;
- g. Data dan informasi, data dan informasi sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan secara efisien.

### **3. Factor Kesejahteraan**

Ada lima faktor yang menentukan hidup sejahtera dalam pengertian yang sebenarnya (Kaswan, 2013:2-3):

- a. Kesejahteraan Finansial Uang memang penting, agar dapat hidup seutuhnya, agar dapat merealisasikan potensi, Anda memerlukan uang.

Uang adalah sangat penting, oleh karena itu merupakan salah satu komponen kehidupan yang sepenuhnya sejahtera.

- b. Kesejahteraan Sehat, Apa artinya memiliki uang yang melimpah jika tidak memiliki kesehatan yang baik. Sehat merupakan aspek kunci dari hidup sejahtera.
- c. Kesejahteraan Hubungan Bahagia, Mempunyai hubungan yang dekat, bermakna harmonis juga kunci menjalani hidup bahagia dan seutuhnya. Hal ini mencakup hubungan keluarga, hubungan kerja, persahabatan dan hubungan romantis.
- d. Kesejahteraan Mental, Banyak orang mengira bahwa pendidikan berakhir setelah sekolah selesai. Padahal pendidikan seharusnya merupakan proses sepanjang hidup. Jika tidak belajar dan tidak tumbuh, maka tidak akan membuat kemajuan dan hidup menjadi sejahtera.
- e. Kesejahteraan Spritual, Spiritual tidak berarti menjadi orang yang religius. Tetapi telah diketahui bahwa orang yang memiliki keimanan terhadap Dzat yang memandunya kepada kehidupan yang lebih utuh.